



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

MOHAMMAD NUH
**PRAKTIKI MEDIA PERLU
TINGKATKAN KEMAMPUAN
MENGHADAPI ERA DIGITAL**

RAPAT KERJA
SEAPC-NET
**AKHIR TAHUN
2020**

JALAN SEMPIT
PERS INDONESIA



TANTANGAN PERS 2021

STOP! KRIMINALISASI TERHADAP WARTAWAN!

PROFESI WARTAWAN DILINDUNGI UNDANG- UNDANG

SEKELOMPOK WARTAWAN DARI BERAGAM MEDIA, CETAK, ELEKTRONIK DAN SIBER SEDANG MELIPUT DEMONSTRASI DI PUSAT IBU KOTA.

BEBERAPA PETUGAS TAMPAK MENGAMATI PERGERAKAN PENDEMO DAN MULAI MEMBATASI PERGERAKAN.



JANGAN SAMPAI RUSUH...

SIAP

SREET...

PETUGAS MEMBLOKADE PENDEMO YANG SEMAKIN MAJU, WARTAWAN BERPENCAR IKUT TERDESAK PENDEMO DAN APARAT.

TETAPI...PENDEMO MULAI RICUH, SALING DORONG. WARTAWAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS PELIPUTAN. DAN...

UU NO. 40 TAHUN 1999 PASAL 8: DALAM MELAKSANAKAN PROFESINYA WARTAWAN MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM.

HEI!

SABAR... BRO...

HAHH...

SESEORANG DARI KERUMUNAN MERASA TERANGGU OLEH KEBERADAAN WARTAWAN.



COVER YUDHIS SUTANTO

TANTANGAN PERS 2021

Oleh: **HENDRY CH BANGUN**
Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022



Tantangan eksternal dan internal pers masih akan sama besarnya pada tahun 2021 yang apabila tidak dapat dikelola dapat berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada pers. Bila peran media massa berkurang maka posisinya akan diisi oleh media sosial, yang bekerja tanpa kontrol etik, tidak peduli pada kualitas informasi yang disajikannya, dapat menjadi corong pihak atau kelompok tertentu, dan tidak bekerja untuk demokrasi.

Secara umum, tantangan dari dalam diri pers diakibatkan semakin merosotnya kesejahteraan wartawan karena terus berkurangnya pendapatan perusahaan media akibat iklan semakin hilang dan semakin sedikit masyarakat mengeluarkan uang untuk “membeli” informasi yang disajikan media.

Efisiensi perusahaan pers membuat media kehilangan wartawan terbaiknya, wartawan dikurangi gajinya atau diminta mengundurkan diri. Dengan keterbatasan tenaga maka berita yang dihasilkan tidak lagi dapat mendalam, menggali substansi masalah, terkadang hanya sekadar menyampaikan informasi permukaan atau artifisial. Padahal di sisi lain media massa mainstream masih diharapkan memberi informasi substansial, mendalam, dan sesuai kebenaran yang hakiki yakni menjelaskan duduk persoalan. Kurangnya kualitas jurnalistik akan berujung pada turunnya tingkat kepercayaan pelanggan media pada informasi di media massa.

Mempertahankan produk jurnalistik yang berkualitas merupakan rangkaian yang melibatkan banyak orang dan *effort* luar biasa, mulai dari menggali informasi, mengolah dan memberi dukungan data, kemudian proses verifikasi berulang dan pemolesan, sebelum dilemparkan publik. Proses ini menuntut biaya tinggi sehingga tidak jarang banyak media mengambil jalan pintas untuk meringankan beban tapi berdampak pada produk yang biasa-biasa saja. Bahkan hanya *menyebarkan press release* sepihak. Padahal di sisi lain



A FOTO WARTAWAN SAAT INGIN MELIPUT DEMONSTRASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, JL. KEBON SIRIH, JAKARTA (SELASA, 13 OKTOBER 2020)

media sosial kadang mampu memancing masyarakat untuk menengoknya karena judul-judul yang provokatif dan potongan-potongan info yang disajikan tanpa verifikasi dan pertanggungjawaban.

TANTANGAN LUAR

Dari luar pers, pelaksanaan Undang-Undang Pers No 40/1999 kian tergerogoti karena masih ada ancaman bagi media dari undang-undang lain yang secara sengaja atau tidak berbenturan dengan UU No. 40. Di samping itu gangguan terhadap penyelenggaraan media, terhadap perusahaan atau awaknya, belum berhenti, dengan berbagai bentuk.

Teror digital bagi wartawan dan perusahaan pers sudah dimulai dan tidak akan terus berjalan yang sedikit banyak mengganggu konsentrasi pers dalam bekerja. Baik untuk menggali informasi atau menyiarkan berita ataupun untuk terus bersikap kritis atas penyelewengan dan kejanggalan yang terjadi di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan besar lainnya dari luar diri pers adalah kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat, mudah, dan gratis. Ada perasaan bahwa media lah yang membutuhkan mereka, karena sebagai bagian dari *big data*, mereka telah menjadi alat negosiasi. Tanpa pembaca, media tidak akan bisa "bersuara" kepada pengiklan, produsen.

Cepat artinya media massa siber merupakan pilihan pertama sehingga media cetak dan televisi mulai kehilangan audiens dan sulit untuk tumbuh, yang menambah derita mereka

akibat tergerusnya iklan oleh Facebook, You Tube, Instagram, Twitter. Media siber seperti Kompas.com, Detik.com, Tribunnews.com, Tempo.co, Republika.com tidak bisa hidup semakmur yang pernah dirasakan media cetak di era keemasannya, dan di sisi lain kualitas jurnalistiknya pun biasa saja.

Mudah artinya masyarakat cenderung mencari informasi bukan berdasarkan *brand* dari media tetapi topik yang sedang hangat, mencari *trending topic*, sehingga media siber pun berlomba-lomba melempar dulu menyajikan kualitas belakangan. Sebab kecepatan berarti memperbesar klik, yang berujung pada jumlah atau besaran rupiah yang akan diterima dari *pageview*. Apabila di masa lalu orang pilih koran berdasarkan korannya, kini berdasarkan tren yang sedang viral, yang sukses mengubah perilaku pengelola media menjadi seperti layaknya bermedia sosial.

Gratis artinya dua, media mencari audiens yang bersedia membayar lewat konten premium dan ini jumlahnya sedikit. Ini membutuhkan wartawan berkualitas, yang tentu saja harus diberi remunerasi yang memadai, yang menyebabkan biaya operasional tinggi. Atau media mengkompensasi pembayaran itu melalui *pageview* dan iklan yang dipasang karena media itu memiliki audien yang membaca jutaan kali perhari.

Sebenarnya masyarakat Indonesia terbiasa memberikan sumbangan sebagaimana kita lihat dari keberhasilan berbagai organisasi untuk menghimpun dana kegiatan sosial atau keagamaan. Tetapi upaya perusahaan pers melakukan *crowd funding*, meminta bayaran untuk konten premium, ber-

langganan tetap untuk jurnalistik online, kurang mendapat sambutan. Tentu ada, tetapi jumlahnya belum dapat dijadikan substitusi sebagaimana dulu di era media cetak. Hasil penelitian Dewan Pers dan Universitas Prof Dr Moestopo pada tahun 2018 menemukan, masyarakat hanya bersedia mengeluarkan uang antar Rp 50.000-Rp 100.000 perbulan untuk “belanja” informasi.

Diterapkan ke media massa jumlah itu sebenarnya akan cukup bisa mereka berlangganan ke satu media, tetapi kenyataan menunjukkan, dengan paket data sebesar itu mereka bisa mencari kesana-kemari, tidak mau setia pada satu merk media. Mereka ingin lihat YouTube, aktif di Facebook, sekaligus mencari informasi di media siber.

KAWAL DEMOKRASI SULIT

Merosotnya kualitas media massa akan membuat tugasnya untuk mengawal demokrasi semakin sulit. Bagaimana mungkin media massa dapat dipercaya untuk membela kebenaran, mengedepankan kepentingan publik, menjadi medium untuk mempertemukan, membahas, dan mencari jalan keluar persoalan bangsa apabila dia sendiri tidak kredibel, tidak akuntabel dan tidak dikelola dengan *good corporate government*, misalnya. Bila tidak diasuh oleh wartawan yang telah teruji tahan godaan, taat mengawal kode etik, bersikap kritis terhadap kekuasaan, berfikir dan bertindak independen, sebuah media hanya menjadi pabrik informasi belaka, yang bahkan saat ini dan ke depan dapat dilakukan mesin.

Kita sudah menyaksikan bagaimana pilar-pilar demokrasi saat ini hanya berstempel saja karena telah banyak berpaling pada kepentingan sendiri, kelompok, ataupun kepentingan uang. Di parlemen, pembentukan undang-undang, proses legislasi, kontrol atas eksekutif, tidak lagi murni untuk kepentingan orang banyak. Penyelenggaraan negara telah menjadi ajang berbagi kekuasaan para kelompok atau partai politik dengan kadar beragam dari pusat ke daerah, tidak lagi fokus untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat sebagaimana disebutkan dalam konstitusi. Sementara Dewi Keadilan yang kepentingan umum sering tidak lagi menjadi acuan dalam memutuskan berbagai perkara, tetapi menjadi alat mendapatkan uang atau tunduk pada kepentingan lain.

Dalam kondisi ini pers betul-betul diharapkan menjadi pilar keempat dari sistem demokrasi yang kita anut, yang kritis terhadap semua jenis kekuasaan karena dia bekerja sebagai alat kontrol. Kalau dia lemah akan semakin semena-menalah penyelewengan yang kita saksikan terjadi saban hari.

PERLU DUKUNGAN MASYARAKAT

Yang dapat menyokong pers adalah masyarakat sendiri karena di sana ada kekuatan besar, secara ekonomi dan moral. Mari kita bayangkan apabila setiap orang dewasa di Tanah Air menyumbang Rp 1000 setiap bulan, akan terhimpun dana tidak kurang dari Rp 125 milyar (sesuai data BPS jumlah penduduk usia 20 sampai 59 tahun Indonesia adalah 125 juta). Atau apabila ada 10 juta penduduk yang mau membayar Rp 10.000 untuk mendapatkan informasi sehat yang teruji, maka



Bila tidak diasuh oleh wartawan yang telah teruji tahan godaan, taat mengawal kode etik, bersikap kritis terhadap kekuasaan, berfikir dan bertindak independen, sebuah media hanya menjadi pabrik informasi belaka, yang bahkan saat ini dan ke depan dapat dilakukan mesin.

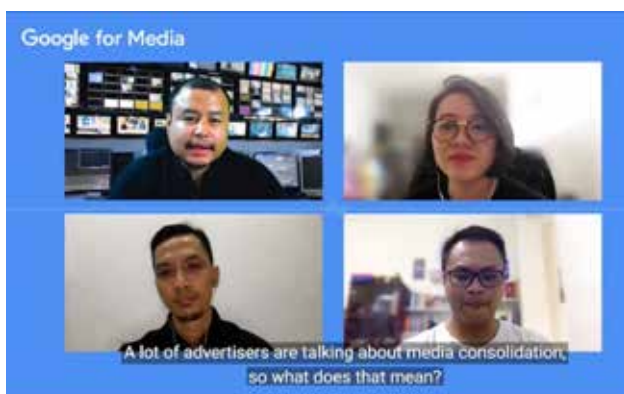
akan ada dana sebesar Rp 100 milyar perbulan, cukup untuk mendukung 3-5 media bermutu di setiap provinsi.

Tentu saja yang paling baik adalah apabila negara melalui APBN menyediakan anggaran bagi pers untuk mengontrol penyelenggaraan alat negara, karena keyakinan bahwa fungsi pers tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan berTanah Air. Bahkan eksistensi pers adalah upaya perimbangan kekuatan antara pemerintah dan rakyatnya. Tetapi bahkan pembebasan pajak kertas, pembebasan pajak untuk penjualan koran masih angan-angan belaka. Perlu kesadaran parlemen dan pimpinan tertinggi negara untuk dapat mewujudkannya.

Kita tidak boleh terlalu berharap pada korporat, kecuali barangkali BUMN, karena justru kecenderungan yang ada saat ini perusahaan besar menjadikan pers sebagai alat pembenaran, alat kampanye pembentukan opini publik yang berpihak pada mereka. Kerusakan alam, pencemaran lingkungan, perusak kesehatan, penambah polisi, giat berkampanye dengan mengguyur dana ke media massa, sehingga isu tentang itu cenderung melemah dan berkurang.

Jalan makin terjal, kekuatan melemah, perhatian masyarakat kurang, dukungan pemerintah tidak signifikan, menjadikan kehidupan pers di tahun 2021 semakin sulit. Hanya tekad dan keyakinan untuk menjaga marwah pers, setia menjalankan profesi, dapat membuat pers bertahan. Semoga Tuhan memberkati. ●

MOHAMMAD NUH PRAKTISI MEDIA PERLU TINGKATKAN KEMAMPUAN MENGHADAPI ERA DIGITAL

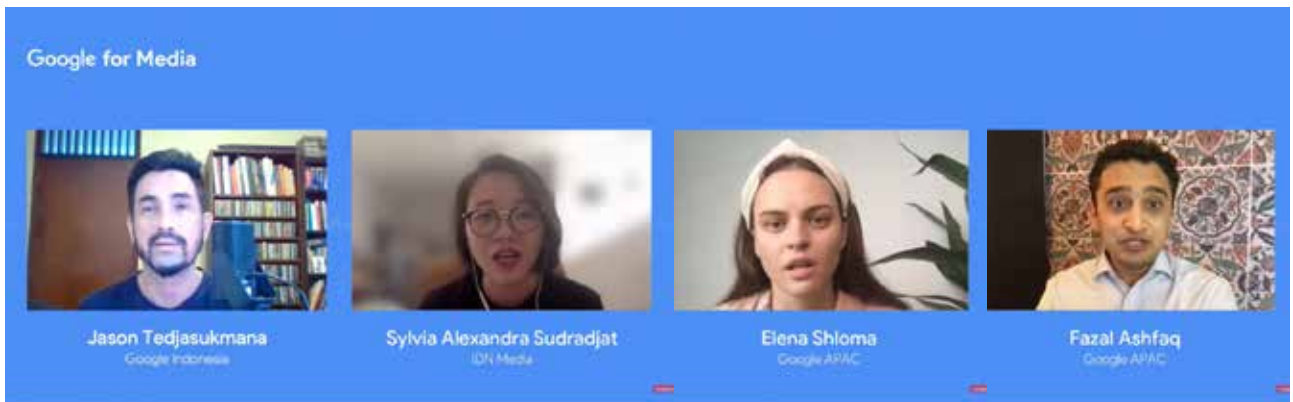


DISKUSI YANG DI ADAKAN DALAM WEBINAR
GOOGLE FOR MEDIA DENGAN TEMA DISKUSI
"CROWDFUNDING NEWS IN INDONESIA".

Ketua Dewan Pers periode 2019-2021 Mohammad Nuh memberikan sambutan pembuka pada webinar Google for Media yang kelima tanggal 15 Desember 2020. Ada tiga hal yang disampaikan oleh Guru Besar ITS ini. Pertama, karena saat ini kita hidup di era digital, maka kita perlu memahami karakteristik dasar teknologi digital, yaitu bahwa semua bidang membutuhkan teknologi digital (*generic purpose for technology*) ini. Konsekuensinya, ada yang memanfaatkan teknologi digital sebagai supporter atau *driver* atau *enabler*. *Enabler* ini masih bisa ditingkatkan menjadi *transformer*, yang bisa melakukan transformasi organisasi masyarakat. Namun puncaknya adalah *disrupter*, dimana teknologi digital bisa mengubah banyak hal.

Kedua, meskipun kita hidup di era digital, tetapi apakah kita sudah mendapatkan bonus digital? Disinilah pentingnya para praktisi media meningkatkan kompetensi mulai dari literasi sampai *skill* yang dibutuhkan untuk masuk ke jurnalistik digital. Dengan peningkatan kompetensi pengelola media ini, pelaku media bergeser dari *physio space* ke *cyber space*, dari analog ke digital.

Yang terakhir atau puncaknya adalah perubahan mindset dan culture terhadap digital tersebut, yang akan memberikan manfaat luar biasa, khususnya menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045.



PROGRAM GOOGLE

Sejak tahun 2018, Google telah menjalankan sejumlah program untuk melatih jurnalis Indonesia dan membantu perusahaan media mulai dari yang kecil sampai besar untuk beradaptasi terhadap perubahan di era digital. Google memiliki komitmen yang tinggi terhadap industri berita dan peran penting industri tersebut dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia.

Selama enam bulan terakhir pada tahun 2020, Google menghadirkan rangkaian webinar untuk menunjukkan sekaligus meningkatkan komitmen mereka terhadap kualitas informasi dari perusahaan media lokal dan nasional. Rangkaian webinar tersebut diselenggarakan sebulan sekali mulai Juli sampai Desember 2020 dengan tema-tema: “*Innovation in the newsroom*”, “*News on YouTube*”, “*Building an online audience*”, “*Strengthening democracy through informed journalists and citizens*” dan “*The changing digital ads ecosystem and alternative monetization models*”.

Kita hidup di era digital, tetapi apakah kita sudah mendapatkan bonus digital? Disinilah pentingnya para praktisi media meningkatkan kompetensi mulai dari literasi sampai skill yang dibutuhkan untuk masuk ke jurnalistik digital. Dengan peningkatan kompetensi pengelola media ini, pelaku media bergeser dari physio space ke cyber space, dari analog ke digital.



WEBINAR GOOGLE FOR MEDIA DENGAN TEMA DISKUSI “CROWDFUNDING NEWS IN INDONESIA”. SELASA 15 DESEMBER 2020

Webinar kelima dengan tema “*The changing digital ads ecosystem and alternative monetization models*” yang diselenggarakan pada 15 Desember 2020 mengeksplorasi bentuk-bentuk inovatif dari monetisasi dan peralihan ke terprogram. Webinar ini juga bertepatan dengan peluncuran perdana Laporan Dampak GNI, dimana Google melihat dua tahun perjalanan Google News Initiative yang telah menjangkau ke pelosok dunia, termasuk Indonesia. Baru-baru ini, Google juga meluncurkan GNI Digital Growth Program di Asia Pasifik, yang didesain bersama ahli industri dan penerbit berita di seluruh dunia untuk membantu organisasi berita berskala kecil dan menengah menumbuhkan bisnis digital mereka. ● (Shanti Ruwyastuti dari Webinar Google for Media)

RAPAT KERJA SEAPC-NET AKHIR TAHUN 2020

Ketua Southeast Asia Press Councils Network (SEA-PC-Net) Mohammad Nuh menyampaikan apresiasi atas perjalanan organisasi regional yang sudah satu tahun pada Desember 2020. Diharapkan aktivitas SEA-PC-Net ini dilanjutkan dan diperluas untuk membangun pers di Asia Tenggara yang kondusif bagi kemerdekaan pers.

Ketua SEAPC-Net yang juga Ketua Dewan Pers juga menambahkan bahwa di era Pandemi Covid-19 kegiatan SEAPC-Net beralih ke ben-

Diharapkan aktivitas SEAPC-Net ini dilanjutkan dan diperluas untuk membangun pers di Asia Tenggara yang kondusif bagi kemerdekaan pers.

tuk secara virtual. Namun demikian diharapkan pertemuan virtual ini tidak mengurangi esensi dalam kebersamaan membangun pers di Asia Tenggara.

Hadir dalam rapat kerja SEA-PC-Net 11 Desember 2020 ini Ketua Dewan Pers Timor Leste Virgilio da Silva Guterres, Ketua Nasional Press Council Thailand Chavarong Limpattamapane dan Ketua Dewan Pers Myanmar Myo Thant Tin. Selain itu hadir Sekretaris Jenderal SEAPC-Net Asep Setiawan, Sekretaris Eksekutif SEAPC-Net Shanti Ruwyastuti dan Steffi Fatima.






Rapat kerja SEAPC-Net ini menghasilkan beberapa masukan dari pengalaman satu tahun perjalanan organisasi regional ini. Selain itu SEAPC-Net juga merancang program kerja untuk tahun 2021.

Masukan yang muncul antara lain dari Chavarong yang mengatakan bahwa dalam program dialog SEA-PC-Net dengan organisasi pers atau sejenis lembaga pers di Asia Tenggara perlu memperhatikan kelembagaan yang diajak dialog. Dengan demikian dialog SEAPC-Net dengan mitranya di Asia Tenggara bisa tepat sasaran.

PROGRAM KERJA

Rapat kerja juga membahas program kerja tahun 2021 yang diharapkan sudah dapat melakukan pertemuan langsung. Salah satu agenda penting adalah peralihan Ketua SEA-PC-Net yang sekarang yang dipimpin Indonesia ke tangan Myanmar selama dua tahun kemudian. Acara serah terima dijadwalkan awal Desember 2021. Menurut, piagam SEAPC-Net peralihan Ketua sesuai jadwal jadi setelah Myanmar yang berikutnya adalah Thailand dan Timor Leste.

Program kerja lainnya adalah pertemuan board of directors SEA-

 **RAPAT KERJA SEAPC-NET**
11 DESEMBER 2021

...dalam program dialog SEAPC-Net dengan organisasi pers atau sejenis lembaga pers di Asia Tenggara perlu memperhatikan kelembagaan yang diajak dialog. Dengan demikian dialog SEAPC-Net dengan mitranya di Asia Tenggara bisa tepat sasaran.

PC-Net di Timor Leste pada bulan Mei 2021. Tanggal pertemuan tersebut akan ditentukan kemudian. Pertemuan di Timor Leste ini seharusnya berlangsung sekitar Juni 2020 namun karena situasi pandemi Covid-19 maka diundurkan pada tahun 2021. Pertemuan rutin pengurus SEAPC-Net dilangsung sedikit sekali setiap bulan.

Program lainnya adalah pertemuan dengan mitra dialog di Asia Tenggara baik organisasi profesi pers atau sejenis dewan pers dilakukan secara rutin setelah disepakati oleh anggota SEAPC-Net. Pada tahun 2020 telah berlangsung dialog dengan sebuah asosiasi wartawan Kamboja dan akan dilanjutkan dengan organisasi pers lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Selain program dialog, SEA-PC-Net juga mengagendakan pertemuan secara virtual membahas isu-isu mutakhir tantangan pers di Asia Tenggara. Dalam rapat kerja juga disepakati agar logo yang sudah dirancang saat ini diperbaiki dengan basis pilihan satu logo dari tiga yang diajukan dalam pertemuan tersebut. Sumber: Hasil Rapat Kerja SEA-PC-Net. ●

JALAN SEMPIT PERS INDONESIA

Oleh: **ARIF ZULKIFLI**

Anggota Dewan Pers/Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Dewan Pers 2019-2022



Tahun 2020 baru saja kita lalui dengan cemas dan mungkin sedih. Sedih ketika kita menengok betapa banyak kerusakan telah diakibatkan oleh pandemi Covid-19, musuh utama umat manusia yang muncul pada 2019 namun mengganas pada 2020. Cemas karena kita tahu virus tak mengenal tarikh: jasad renik itu mengintai tanpa peduli pada pergantian tahun. Vaksin memang telah ditemukan tapi pengadaan dan distribusinya yang tak mudah membuat kita bertanya-tanya: akankah pada 2021 umat manusia benar-benar terbebas dari pagebluk ini?

Majalah *Time* edisi akhir tahun menyebut 2020 sebagai *the worst year ever*. Kritikus film Stephanie Zacharek, yang judul artikelnya dipilih sebagai topik laporan utama majalah itu, menulis, "Ketidakberdayaan telah bertemu dengan kembarannya jahatnya, *a partner in crime*, yang hanya akan memperbesar kekuatan gila mereka: isolasi." Di pelbagai penjuru dunia, karantina yang tak disertai bantuan sosial yang memadai telah melahirkan orang miskin baru. Kita tahu dampak pembatasan wilayah yang ketat tak bisa dipikul oleh kaum papa -- mereka yang hidup dari penghasilan harian.

Pandemi memukul semua segi kehidupan, juga media dan para jurnalis. Sesuatu yang paradoks tak terhindarkan terjadi: keterbatasan ruang gerak wartawan dalam meliput berlangsung bersamaan dengan keingintahuan publik yang sangat besar terhadap penanganan pandemi dan implikasi sosial politik bencana ini.

Hingga kini, misalnya, rumor tak pernah benar-benar bisa diverifikasi: benarkah pengadaan alat tes cepat (*rapid test*) telah dimainkan oleh segelintir pengusaha, politisi bahkan pejabat sehingga, terutama di awal pandemi, harga jualnya sangat tinggi.

Contoh lain, benarkah telah terjadi mismanajemen akut dalam pengelolaan pagebluk. Benarkah pembentukan tim adhoc penanganan Covid-19 dilakukan murni dengan motif memerangani bencana dan bukan *power game* di kalangan petinggi negara? Lebih jauh lagi: benarkah sebuah lembaga adhoc telah dibentuk tanpa wewenang anggaran dan eksekusi? Benarkah upaya signifikan mengatasi salah urus itu tidak dilakukan semata untuk menjaga keseimbangan politik?

Tak semua persoalan memang abai dari mata jurnalis. Dugaan korupsi bantuan sosial, misalnya, berpekan-pekan ditulis media jauh sebelum Menteri Sosial Juliari Batubara dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Suap ekspor bibit lobster ramai menjadi tajuk berita sebelum KPK menangkap-tangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Situs berita *Tirto.id* dengan tekun menelusuri kaitan Walikota Solo terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah pemodal yang ditengarai membantunya kemenangan putra Presiden Jokowi itu dalam pemilihan kepala daerah lalu.

Ikhtiar memenuhi kepentingan publik itu dilakukan di

tengah gempuran terhadap pers oleh mereka yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Peretasan situs media dilakukan untuk menyulitkan akses orang ramai terhadap berita. Terhadap sebagian media daring, peretasan juga dilakukan dengan tujuan menghapus informasi yang dianggap merugikan.

Doxing atau praktek menggali jejak digital pribadi dilakukan untuk melemahkan rasa percaya diri wartawan. Dalam pelaksanaannya *doxing* tak berdiri sendiri melainkan dijalankan bersamaan dengan *ad hominem*.

Yang terakhir adalah perbuatan memaksakan hubungan dari dua hal yang sebetulnya tidak berhubungan. Jika dalam *doxing*, misalnya, ditemukan fakta wartawan ketika sekolah pernah tak naik kelas, maka para pendengung akan mengatakannya kualitas liputan si wartawan buruk karena wartawan itu pernah tinggal kelas. Difabrikasi oleh ribuan pengikut – entah robot atau orang sungguhan – *ad hominem* itu dipercaya atau dipersepsikan layak dipercaya.

Upaya mempersoalkan praktek itu ke polisi menemukan jalan buntu karena anonimitas pelaku. Di lain pihak kementerian itu telah melahirkan wasangka bahwa aparat tahu dan membiarkan praktek itu terjadi.

Tanpa bermaksud meromantisasi kerja wartawan, pada kenyataannya pers menjalankan tugas yang tak mudah. Ia berjalan dalam koridor yang sempit: antara memenuhi hak publik untuk tahu dan kewajiban memenuhi etika jurnalistik. Di tengah pelbagai upaya memerangi kebebasan pers di atas, koridor itu bahkan telah berubah menjadi jalan setapak.

Dalam menjalankan mandatnya, harus diakui pers pun kerap terpeleset. Dari sekitar 800 surat pengaduan yang masuk ke Dewan Pers sepanjang 2020, sebagian besar perihal ketidaktaatan media pada kode etik yang terutama dilakukan media online. Yang kerap digugat adalah berita yang tidak diverifikasi, judul yang menghakimi dan penggunaan sumber tunggal. Media yang melakukan kesalahan berulang-ulang, dengan mudah dianggap memiliki niat buruk (*malice*) yang menjadikan kredibilitas media tersebut layak dipertanyakan.

Selain perihal pemahaman wartawan pada kode etik, problem mendasar yang menyebabkan pelanggaran ini adalah pada model bisnis media. Kita telah lama mahfum: media online mendasarkan pemasukannya pada iklan yang datang seiring banyaknya pengunjung media tersebut.

Upaya mengundang kerumunan itu menggoda wartawan untuk menulis berita sensasional, asal cepat dan dangkal. Peningkatan media berdasarkan jumlah pengunjung telah membuat situs berita berlomba-lomba memproduksi berita yang sesuai dengan algoritma mesin pencari. Model bisnis media berbayar baru diterapkan sebagian perusahaan pers karena dianggap tidak cepat mendatangkan untung.

Di lain pihak, bantuan pemerintah lewat program beasiswa liputan kehidupan normal baru telah membantu perusahaan media bertahan di masa pandemi. Model pembiayaan liputan ini sesungguhnya telah lazim dilakukan media barat, bahkan oleh mereka yang terbukti kredibel menjaga independensi. Intinya, program ini membiayai liputan media dengan topik bagaimana tetap sehat di era pandemi, tanpa campur tangan penyandang dana pada pilihan angle, pilihan nara sumber dan cara penyajian. Model pembiayaan serupa pernah dipraktikkan banyak media dengan pelbagai penyan-



Tanpa bermaksud meromantisasi kerja wartawan, pada kenyataannya pers menjalankan tugas yang tak mudah. Ia berjalan dalam koridor yang sempit: antara memenuhi hak publik untuk tahu dan kewajiban memenuhi etika jurnalistik.

dang dana untuk topik universal seperti pemanasan global, perlindungan pada anak dan perempuan atau gerakan melawan pembalakan liar.

Meski seyogianya tidak menggerus independensi pers, dalam prakteknya model pembiayaan semacam ini membuat media *pakewuh* terhadap penyandang dana atau yang mereka persepsikan sebagai penyandang dana. Program beasiswa yang diberikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 – belakangan berganti nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 – menjadikan media sungkan mengkritik kerja Satuan Tugas.

Di banyak tempat praktek serupa kerap terjadi: anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk iklan media menjadikan media itu merasa berutang budi. Sebaliknya tak sedikit kepala dinas komunikasi dan informatika pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang menganggap tak selayaknya mereka dikritik pers karena merasa telah “berjasa” membantu pers.

Pelbagai peristiwa sepanjang 2020 di atas menunjukkan betapa tak mudahnya kerja pers pada tahun ini dan setelahnya. Kemerdekaan pers harus dijaga bukan hanya karena oleh rezim manapun hal itu akan dianggap sebagai ancaman, melainkan juga karena secara intristik pers berpotensi membatasi kebebasannya sendiri.

Kesemberonoan kerja dan keinginan untuk meraup untung tanpa mengindahkan kaidah adalah dua hal yang harus dicegah. ●



TAHUN 2020:

TOTAL KASUS: 415
SELESAI: 365 (88%)
DALAM PROSES: 50 (12%)

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2020



REKAP: DATA PELAKSANAAN UKW 2019 DAN 2020

PENYELENGGARAAN UKW TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA UKW	JUMLAH PENYELENGGARA UKW	MUDA	MADYA	UTAMA	TOTAL PESERTA KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	TOTAL SELURUH PENDAFTAR
1	PWI	67	1066	101	35	1202		1202
2	AJI	6	65	19	26	110		110
3	IJTI	9	129	1	0	130	5	135
4	LPDS	9	148	15	9	172		172
5	UPN Yogja	4	52	2	0	54	4	58
6	LSPR	3	43	4	1	48	0	48
7	LKBN ANTARA	1	13	1	3	17		17
8	Dewan Pers	1	0	0	4	4		4
9	Kompas	1	15	0	0	15		15
	Grand Total	101	1531	143	78	1752	9	1761

PENYELENGGARAAN UKW UKW JANUARI TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA UKW	JUMLAH PENYELENGGARA UKW	MUDA	MADYA	UTAMA	TOTAL PESERTA KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	TOTAL SELURUH PENDAFTAR
1	PWI	23	410	71	18	499		499
2	AJI	4	65	9	23	97		97
3	IJTI	5	82	1	0	83	1	84
4	LPDS	1	10	0	0	10		10
5	UPN Yogja	2	21	0	0	21	9	30
6	LSPR	1	5	0	0	5		5
7	LKBN ANTARA	1	18	6	6	30		30
8	Tempo	1	0	5	10	15		15
9	Univ. Moestopo	1	12	0	1	13		13
	Grand Total	39	623	92	58	773	10	783



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

KEMERDEKAAN PERS DAN KEBERLANJUTAN MEDIA

CATATAN AKHIR TAHUN 2020

DEWAN PERS

Tahun 2020 merupakan tahun penuh keprihatinan. Bangsa Indonesia menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Krisis yang memukul kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu dengan dampak yang berkepanjangan. Salah satu kunci dalam penanganan pandemi covid-19 adalah keberhasilan menjalankan komunikasi publik. Masyarakat senantiasa membutuhkan informasi memadai tentang pandemi covid 19 yang dapat menjadi pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif. Di sinilah, media massa semestinya berperan besar. Media massa dapat menjembatani proses komunikasi dan arus informasi sehingga masyarakat terhindar dari simpang-siur tentang skala penyebaran virus dan wacana yang asimetris tentang tingkat kegentingan situasi akibat pandemi. Dalam konteks yang sama, Dewan Pers menyampaikan apresiasi terhadap pers nasional Indonesia. Meskipun juga terdampak oleh krisis ekonomi, pers nasional tetap berhasil mengemban peran tersebut. Melalui pemberitaan, sikap editorial dan iklan layanan masyarakat, Pers Indonesia telah berkontribusi nyata dalam upaya seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menanggulangi pandemi covid 19 pada tahun 2020.

Pada penghujung tahun 2020 ini, Dewan Pers juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pelembagaan dan pengembangan kemerdekaan pers dan profesionalisme media di Indonesia tahun 2020. Dewan Pers mengucapkan terima kasih atas komitmen pemerintah untuk memberi insentif ekonomi untuk industri media nasional yang sedang menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku yang melibatkan 4300 wartawan dari seluruh Nusantara. Sebagai upaya untuk mengarusutamakan perubahan perilaku dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat, program ini merupakan kerjasama antara Satgas Penanganan Covid-19, Dewan Pers dan konstituen pers nasional. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang telah mendukung program ini.

Dewan Pers juga mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang dalam penanganan kasus-kasus terkait dengan pemberitaan media, telah banyak melibatkan ahli pers yang ditunjuk Dewan Pers untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Dewan Pers juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama setahun terakhir telah mengajukan pengaduan sengketa pers ke Dewan Pers. Tentu sebuah perkembangan yang positif bahwa unsur pemerintah, legislatif, swasta, dan masyarakat telah memilih Dewan Pers sebagai lembaga penyelesaian sengketa jurnalistik atau sengketa pemberitaan pers. Apresiasi juga kami berikan kepada semua pihak yang telah bekerja-sama dengan Dewan Pers untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalistik, seminar, diskusi, pendataan dan penelitian tentang pers selama tahun 2020.

Dalam kesempatan ini, Dewan Pers mengucapkan belasungkawa mendalam kepada seluruh warga bangsa yang telah menjadi korban pandemi covid-19, khususnya kepada para tenaga medis yang telah gugur menjalankan tugas kemanusiaan menolong korban-korban pandemi covid-19. Dewan Pers juga turut berduka cita atas korban meninggal dunia dalam peristiwa kekerasan di Papua dan di Sigi Sulawesi Tengah, serta atas enam orang yang meninggal dunia dalam insiden di Kilometer 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dewan Pers mendukung upaya Penegak Hukum untuk menangani kasus-kasus tersebut. Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, serta dengan senantiasa menjaga azas praduga tak bersalah, Dewan Pers berharap pers nasional memberitakan kasus-kasus tersebut secara proporsional, berkelanjutan dan berorientasi kepada kemanusiaan, kebenaran dan penegakan hukum.

Secara umum ada dua persoalan yang sedang dihadapi pers Indonesia saat ini. Pertama, persoalan pada aras keberlanjutan media. Kedua, persoalan pada aras profesionalisme media dan perlindungan terhadap pers. Pada aras keberlanjutan media, pers Indonesia dihadapkan pada masalah tekanan disrupsi yang muncul bersamaan dengan semakin kuatnya penetrasi bisnis perusahaan platform digital di Indonesia dan di negara lain. Berkat kekuatan teknologi, modal dan jaringan yang dimilikinya, platform digital semakin mendominasi ranah media, semakin berpengaruh terhadap kehidupan publik dan memperoleh pendapatan iklan yang semakin besar dan menggeser kedudukan media massa konvensional. Dalam konteks ini, perlu dirumuskan aturan main yang lebih transparan, adil dan menjamin kesetaraan antara platform digital dan penerbit media. Dibutuhkan regulasi yang memungkinkan koeksistensi antara media lama dan media baru, yang sebenarnya saling membutuhkan. Dibutuhkan ekosistem media yang memungkinkan para penerbit profesional untuk memperoleh hak atas karya jurnalistik yang telah diproduksinya. Dalam konteks ini, pemerintah, asosiasi media, para penerbit dan Dewan Pers dapat belajar dari politik regulasi tentang platform digital di negara lain.

Masih pada aras keberlanjutan media, krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 telah memukul daya hidup banyak media massa. Akibat menurunnya pendapatan, banyak perusahaan media merampingkan manajemen, melakukan PHK karyawan, atau mengurangi gaji karyawan. Secara umum kesejahteraan wartawan menurun karena terjadi penurunan pendapatan perusahaan media dan semakin berkurangnya khlayak yang bersedia mengeluarkan uang untuk “membeli” informasi yang disajikan media. Efisiensi karena krisis ekonomi membuat banyak media kehilangan wartawan terbaik. Dengan keterbatasan SDM, maka kualitas pemberitaan yang dihasilkan dikhawatirkan juga mengalami penurunan. Hal ini dapat berujung pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap media massa. Sementara pada sisi lain, arus informasi yang tersaji di media sosial mengalir tanpa standar etika yang tegas sehingga dalam banyak kasus membingungkan masyarakat, bahkan cenderung memecah-belah.

Dalam konteks ini, insentif negara untuk industri pers nasional sangat mendesak untuk diterapkan. Komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberikan insentif ekonomi untuk pers nasional mesti segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga dapat benar-benar diterapkan. Keringanan pajak, tarif listrik, biaya perijinan dan jaminan sosial yang dijanjikan pemerintah sangat ditunggu perwujudannya dan akan sangat membantu pers nasional dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Sebagaimana sering dinyatakan Pemerintah, pers adalah garda depan upaya penanganan covid-19. Pers juga merupakan pilar penting demokrasi dan perwujudan pemerintahan yang bersih dan transparan. Maka menyelamatkan nasib pers dalam situasi sekarang ini, merupakan investasi untuk masa kini sekaligus untuk masa depan bangsa Indonesia.

Berhadapan dengan krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, kebijakan penghematan anggaran dan perampingan manajemen menjadi pilihan yang sulit dihindari oleh perusahaan media. Langkah PHK karyawan di tempuh beberapa perusahaan media. Dewan Pers menaruh harapan besar agar perusahaan media dapat segera keluar dari situasi krisis dan dapat mempertahankan eksistensi dan kualitas jurnalismenya. Terkait dengan kebijakan pengurangan atau PHK karyawan, kami berharap dapat dilaksanakan dengan hati-hati dan bijaksana, dengan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan, serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kami meyakini wartawan dan seluruh karyawan adalah aset penting bagi perusahaan media yang mengedepankan nilai-nilai jurnalisme, kemanusiaan dan demokrasi.

Tantangan berikutnya adalah kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat, mudah, dan gratis. *Free online culture* merupakan kebaruan yang dibawa digitalisasi. Layanan daring seperti mesin pencari dan media-sosial dapat diakses secara bebas. Kita dapat memperoleh informasi, pengetahuan, hiburan, dan jejaring secara cuma-cuma disana. Para pengguna didorong untuk berkontribusi pada budaya berbagi secara daring itu dengan membagikan apapun di ruang digital. Maka terbentuklah ekosistem digital di mana karya, kekayaan intelektual dan keahlian pemusik, penerjemah, wartawan, penulis, peneliti, media massa dan lain-lain diperlakukan sebagai "milik bersama" yang dapat diakses secara bebas. Kebebasan berinternet kemudian tidak bukan berarti kita dapat mengakses apa pun di dunia maya, melainkan juga bahwa kita dapat menikmati jerih-payah orang lain tanpa memberi imbalan apa pun.

Budaya baru itu memang menguntungkan platform digital yang dapat memanfaatkan dan memonetisasi konten pihak lain secara "cuma-cuma". Demikian juga dengan para pengguna yang semakin terbiasa memperoleh segala rupa informasi secara gratis. Namun bagaimana dengan para wartawan atau penulis yang hidup dari penghargaan atas karya-karya mereka? Bagaimana dengan media massa yang harus membayar setiap jerih-payah wartawan dalam menghasilkan berita? Jika berita itu kemudian diagregasi dan disebarluaskan secara cuma-cuma, bagaimana masa depan wartawan, media massa dan institusi jurnalisme secara lebih luas? Hal ini perlu menjadi pemikiran

bersama, baik untuk kalangan media, platform digital, pemerintah maupun pembaca yang sering menyebarkan konten jurnalistik milik media secara daring tanpa memikirkan nasib media dan wartawan yang menghasilkan konten tersebut.

Pada aras profesionalisme media dan perlindungan terhadap pers adalah beberapa hal yang perlu disampaikan di sini. Pertama, tingginya angka pengaduan kasus pers ke Dewan Pers tahun 2020 menunjukkan dua hal sekaligus. Di satu sisi hal ini menunjukkan perkembangan positif, yakni semakin meningkatkannya kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian kasus pers berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999. Di sisi lain, tingginya angka pengaduan kasus pers itu juga mencerminkan ada yang perlu diperbaiki dalam jurnalisme kita, yakni ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Mayoritas kasus pemberitaan pers yang ditangani Dewan Pers berakhir dengan kesimpulan bahwa “telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media massa yang diadukan”. Baik pelanggaran KEJ yang serius maupun yang ringan. Kasus menonjol yang dihadapi Dewan Pers dalam hal ini adalah ketika 33 media massa siber terbukti telah menggunakan informasi yang tidak akurat, tanpa proses konfirmasi yang memadai terhadap sumber kunci sehingga melahirkan pemberitaan yang cenderung menghakimi terkait Keputusan PTUN tertanggal 3 Juni 2020 tentang keputusan Presiden dan Menkominfo memperlambat dan memutus akses internet di Papua tahun 2019. Bertolak dari kasus semacam ini, Dewan Pers kembali mengingatkan kepada segenap pers Indonesia tentang pentingnya komitmen dan konsistensi untuk menaati KEJ. KEJ bagaimana pun adalah tolok ukur utama profesionalisme dan kualitas pers. Ketaatan terhadap KEJ adalah faktor yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa.

Kedua, pada aras perlindungan pers, Dewan Pers mencatat masih terjadi pemidanaan terhadap pers dan kekerasan terhadap wartawan pada tahun 2020. Pemidanaan seorang wartawan atas karya jurnalistik yang dihasilkannya tentu merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, hal inilah yang terjadi terhadap Diananta Putra Sumedi, mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id. Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menjatuhkan vonis penjara selama 3 bulan 15 hari kepada Diananta atas berita yang ditulisnya dan dipublikasikan di media siber *kumparan.com* 4 Mei 2020. Dewan Pers telah mengingatkan bahwa kasus Diananta adalah kasus pers yang semestinya diselesaikan berdasarkan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999. Dewan Pers berharap kasus serupa tidak terjadi lagi. Fakto penentunya dalam hal ini koordinasi yang baik antara Kepolisian dan Dewan Pers, serta penghormatan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam MOU Dewan Pers dan Polri. Dewan Pers juga berharap kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana terjadi dalam peliputan Demonstrasi UU Cipta Kerja tidak terjadi lagi. Aparat Keamanan perlu meningkatkan penghargaannya terhadap fungsi dan kerja jurnalistik sebagaimana dilindungi oleh undang-undang.

Masalah ketiga yang muncul dalam konteks perlindungan pers adalah peretasan digital. Pada 22 Agustus 2020, situs *Tempo.co* mengalami peretasan sehingga tampilan lamannya menjadi hitam dengan sejumlah pesan yang menyudutkan redaksi. Di hari yang sama, sejumlah artikel *Tirto.id* terkait kontroversi penemuan obat Covid-19 yang menyinggung keterlibatan dua lembaga negara mendadak hilang. Salah satu artikel *kompas.com* berjudul "Akun Twitter Ahli Edemiologi UI Pandu Riono Diretas" juga dihapus pihak yang tidak diketahui identitasnya pada 23 Agustus 2020. *Detik.com* juga mengalami gangguan peretasan pada periode yang kurang lebih sama. Dewan Pers menyesalkan rentetan peristiwa ini dan menganggapnya sebagai masalah serius bagi situasi kemerdekaan pers di Indonesia. Dewan Pers juga mengutuk tindakan doxing yang dilakukan pihak tertentu kepada sejumlah wartawan belakangan ini. Tindakan penyebaran informasi pribadi wartawan secara publik dan tanpa seizin yang bersangkutan tentu merupakan sebuah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dan bertentangan dengan hukum. Pers atau wartawan bisa saja membuat kesalahan dalam pemberitaan maupun kegiatan peliputan hingga merugikan pihak tertentu. Namun hendaknya semua pihak mempersoalkan kemungkinan kesalahan itu secara transparan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999. Semestinya semua pihak menghindari tindakan-tindakan yang mengarah pada teror atau pembungkaman. Dewan Pers berharap penegak hukum mengusut kasus kejahatan digital yang menasar institusi dan individu pers tersebut agar tidak menjadi ancaman yang semakin sistemik terhadap kemerdekaan pers.

Pada akhirnya, Dewan Pers kembali mengingatkan pentingnya segenap unsur pers menjaga prinsip independensi, profesionalisme dan transparansi. Media massa dapat dipercaya untuk membela kebenaran, mengedepankan kepentingan publik, menjadi sarana untuk mencari jalan keluar persoalan bangsa sejauh pengelolanya senantiasa kredibel, akuntabel dan menjadikan etika media sebagai "panglima". Pers dapat tegak menjadi pilar keempat demokrasi jika pengelola media tidak mudah berpaling kepada kepentingan sendiri, kelompok, ataupun kepentingan uang. Media massa dapat menjadi bisnis yang berkelanjutan jika pengelola mampu beradaptasi dengan perubahan serta senantiasa berpijak pada prinsip-prinsip good corporate governance.

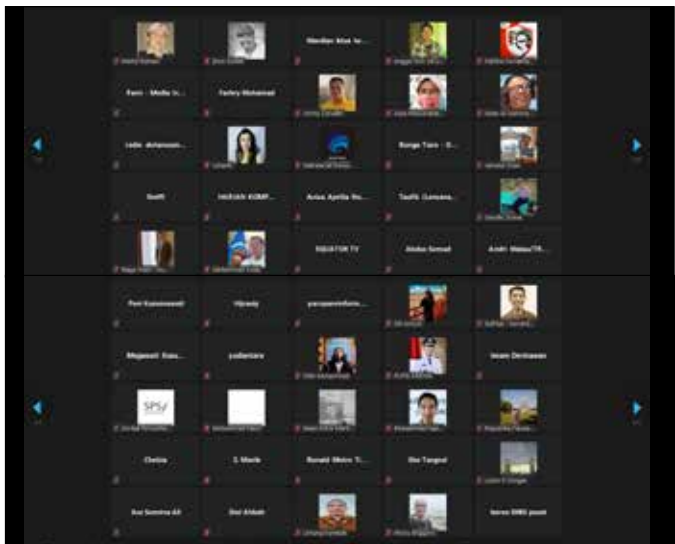
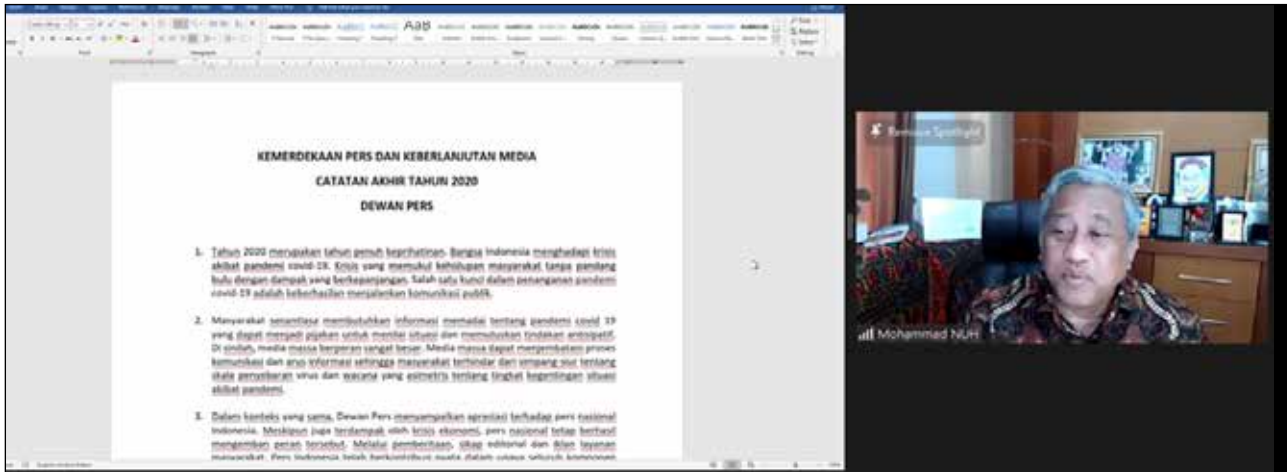
Jakarta, 23 Desember 2020

Dewan Pers



Mohammad NUH
Ketua **DEWANPERS**

GALERI DEWAN PERS



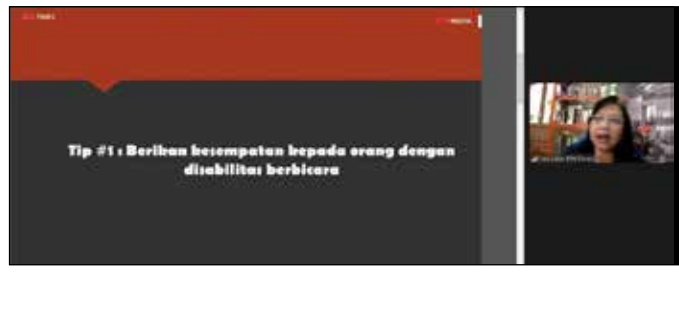
DEWAN Pers menggelar konferensi pers “Kemerdekaan Pers Dan Keberlanjutan Media: Catatan Akhir Tahun 2020 Dewan Pers” secara virtual pada Rabu (23/12).

GALERI DEWAN PERS



DEWAN Pers menggelar rapat kerja di Bogor, Rabu (16/12). Rapat yang digelar secara *offline* dan *on-line* tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Ahli serta Sekretariat Dewan Pers dan membahas rencana kerja tahun 2021. ●





MENUTUP tahun 2020, Dewan Pers menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Dukungan Edukasi Hak Penyandang Disabilitas di Berbagai Media secara virtual pada Senin (28/12). FGD yang dimoderatori oleh anggota kelompok kerja Dewan Pers, Dwi Ajeng Widarini tersebut menghadirkan nara sumber antara lain Direktur Pelaksana Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Jakarta - Agoes Rakhman, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia - Wiryanta, serta Pemimpin Redaksi IDN Times - Uni Lubis. ●